



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA METRO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemilihan Umum Kota Metro berkewajiban menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 612/ ORT.04/ 05/ KPU/ XII/ 2020 tentang Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 314/ORT/07/Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
Pada Tanggal 10 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTAMETRO,

Ttd.

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Dedi Suwarsono



No	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6												7	
				1. Jumlah jumlah aplikasi Kepemiluan yang dimanfaatkan, serta: 1) Data pengunjung bagi aplikasi yang bisa diakses publik 2) Indeks Survei Kepuasan Publik terhadap aplikasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				2. Jumlah permohonan melalui aplikasi PPID Satuan kerja oleh publik								√					√	
		4. Penerapan sistem kearsipan yang handal		1. Terkelolanya arsip statis, dinamis, manual dan digital di lingkungan KPU Kota Metro	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2. Terkelolanya arsip statis dan dinamis di lingkungan KPU Kota Metro	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				3. Terdokumentasi arsip vital	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				4. Jumlah pemangku jabatan yang berstatus JF Arsiparis														
5	Penguatan Sistem Manajemen	1. Pembangunan Sistem Merit	1. Penerapan Pengukuran Kinerja Individu	1. Seluruh pegawai memiliki Sasaran Kinerja Pegawai	√	√												
				2. Seluruh pegawai memahami indikator keberhasilan dari tugas dan jabatan (Target output/mutu/waktu/biaya)	√	√												
			2. Penerapan assesement untuk pertimbangan pengembangan karir dan mutasi pegawai	1. Data Mutasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2. Data Promosi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				3. Data Peserta Assesment	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

No	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1																	
			3. Penerapan disiplin dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	1. Jumlah Pelanggaran tahun sebelumnya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				2. Jumlah Pelanggaran tahun ini	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				3. Jumlah pelanggaran yang sudah diberikan sanksi/hukuman	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			4. Perencanaan kebutuhan/penambahan jumlah pegawai baik ASN maupun non ASN menggunakan Analisa Beban Kerja	Tersedianya dokumen Analisis Beban Kerja					√								√
			5. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	1. Adanya identifikasi kebutuhan kompetensi di lingkungan unit kerja								√	√	√	√	√	
				2. Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			6. Implementasi Standar Kompetensi Jabatan	Setiap Jabatan sudah memiliki Standar Kompetensi Jabatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			7. Pengisian Sistem Informasi Kepegawaian	Data Kepegawaian yang mutakhir dilingkungan unit/satuan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		2. Profesionalisme ASN	Pembangunan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	Jumlah dan jenis jabatan fungsional yang mendukung unit dan satuan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Penyusunan dan penetapan Renstra Satuan Kerja	Renstra satuan kerja Renstra hasil reuiu	√					√							
			2. Reuiu Renstra Satuan Kerja							√							

No	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6												7			
			3. Penetapan Kinerja dengan menerapkan reward and punishment	1. Adanya dokumen penetapan Kinerja hingga level Eselon IV	√							√							√	
				2. % Capaian kinerja merupakan unsur pemberian Reward & Punishment								√	√	√	√	√	√	√		
			4. Penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien	1. Adanya Program dan kegiatan: 1) Jumlah program 2) Jumlah kegiatan 3) Jumlah program yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi 4) Jumlah kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			5. Pemanfaatan aplikasi terintegrasi untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran	Adanya aplikasi terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				% Capaian kinerja unit/satuan kerja															√	
			6. Evaluasi Capaian Kinerja Unit/Satuan Kerja	1. Adanya rencana tindak lanjut dan pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi capaian kinerja unit/satuan kerja											√				√	
				2. Reviu Lakip unit/satuan kerja						√										
			7. Pelaporan Kerja Unit/Satuan Kerja	Pelaporan kinerja unit/satuan kerja tepat waktu						√									√	
		2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1. Pemutakhiran data kinerja di aplikasi E- Lapkin;	1. Terisinya aplikasi e- Lapkin						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2. Data e- Lapkin unit/satuan kerja termutakhir						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

No	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6												7	
			4. Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan Sistem pengendalian gratifikasi	1. Laporan pengendalian gratifikasi							√							√
				2. Tindak lanjut Pengendalian gratifikasi yang sudah dilaksanakan								√	√	√	√	√	√	
		3. Pelaksanaan Whistle Blowing System KPU	1. Pembangunan aplikasi Whistle Blowing System di Lingkungan KPU Kota Metro	1. Tersedianya aplikasi WBS yang bisa diakses oleh publik								√						
				2. Adanya SOP WBS								√						
				3. Adanya Pengelolaan WBS								√						
		4. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU Kota Metro	1. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut atas Pengelolaan Benturan Kepentingan.	Dokumen laporan monitoring, evaluasi pengelolaan Benturan Kepentingan.								√					√	
		5. Peningkatan SPIP di lingkungan unit/satuan kerja	1. Pembangunan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) di lingkungan Unit/Satuan Kerja	Adanya tim SPIP pada satuan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2. Pelaksanaan SPIP: 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian resiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi 5) Pemantauan pengendalian intern	Terselenggaranya: 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian resiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi 5) Pemantauan pengendalian intern	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan SPIP	Pelaporan Buku Kendali tepat waktu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
		6. Penanganan pengaduan masyarakat KPU	1. Pembangunan Sistem Pengaduan masyarakat di Lingkungan KPU Kota Metro	1. Tersedianya sarana penyampaian pengaduan,	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
				2. Adanya pejabat yang mengelola pengaduan;								√	√	√	√	√		

No	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6												7	
		3. Pembangunan Zona Hijau Pelayanan Publik	Membangun dan Menerapkan variabel dan indikator Zona Hijau Pelayanan Publik: 1. Standar Pelayanan: a) Prasyarat layanan b) Sistem Mekanisme Prosedur c) Produk Layanan d) Jangka waktu penyelesaian e) Biaya/tarif	1. Tersedianya standar pelayanan sesuai amanat UU	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				2. Tersedianya Maklumat Pelayanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		4. Penerapan partisipasi publik dalam pelayanan publik	1. Pembangunan Kerja Sama						√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemilu	Laporan kegiatan sosialisasi kepemiluan di masyarakat							√		√		√			
		5. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik;	Pembangunan dan pelaksanaan reward dan punishment dalam pelayanan internal dan eksternal	Adanya pemberian reward dan punishment dalam pelayanan													√	√

Ditetapkan di Metro
 Pada tanggal 10 Januari 2023
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA METRO

Ttd.

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan Sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA METRO
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

